

# Mensiasati Ideologi Neoliberal dalam Pendidikan

Ilyya Muhsin  
Universitas Gadjah Mada

## *Abstracts*

When globalization put in education, cultural and economic, it was expansion to instill western ideology and brain washing for people in the underdeveloping countries like Indonesia. Ironically, the government legitimized foreign higher education in Indonesia. There was a dilemmatic choice that the presence of foreign higher education in Indonesia, at the one hand makes education more competitive and rich in quality, and the other hand, causes an indoctrination of ideology neoliberalism. Western life standards to be the complete opposite of producing civilization in the nation without balancing of local culture must be permanent. This article tries to discuss the fight of western ideology with developing in education, exactly for current issues.

**Kata Kunci:** Komersialisasi Pendidikan, Perguruan Tinggi Asing, Globalisasi

Sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, negara Indonesia menjalin kerja sama dengan negara-negara tetangga, seperti Kanada, Amerika, Australia, Malaysia dan negara-negara maju yang lain. Upaya ini, jelas memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Dengan mengadopsi berbagai bentuk sistem pendidikan dari negara-negara maju yang menggunakan logika saling melengkapi, pemerintah Indonesia mengandaikan percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pendidikan Indonesia yang sampai saat ini masih dalam keadaan mengendur. Ketidakjelasan arah kebijakan di dunia pendidikan telah membuat bingung berbagai pihak yang terkait.

Dampak dari kerjasama tersebut membuahkan improvisasi sistem pendidikan dan meningkatkan wawasan *multi-cultural education*. Akan tetapi,

biar bagaimanapun, sikap inferioritas negara terbelakang (*under developed country*) yang berlebihan terhadap negara maju (*developed country*) sebagai simbol kemodernan dan kemajuan, akan menimbulkan krisis identitas bangsa itu sendiri. Selain itu, ketergantungan pendidikan dengan negara (Barat) yang terlalu lama dan berlebihan, tanpa adanya upaya pembaharuan pendidikan di negara tuan rumah, bisa menciptakan penetrasi budaya. Akibatnya arus budaya manca berkembang semakin kuat di Nusantara ini, bahkan di kalangan generasi muda telah terlihat dengan jelas perubahan-perubahan sosio-kultural yang berkaca pada gaya hidup barat.

Pertanyaannya adalah Siapkah kita dengan “pertarungan ideologi” dan “benturan kebudayaan”, apabila lembaga pendidikan asing masuk ke negara kita? Pertanyaan menggelitik itulah yang sampai sekarang belum mampu dijawab oleh bangsa Indonesia. Terlepas dari pro dan kontra, kualitas SDM kita memang rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, suatu hal yang sangat mengkhawatirkan ketika Indonesia dituntut untuk bersaing dengan negara-negara maju tersebut, terutama dalam bidang perdagangan pendidikan.

Menurut data dari laporan UNDP sebagai institusi inisiator dan penyelenggara survei *Human Development Index* (HDI), ternyata Indonesia hanya mampu menempati peringkat ke-102 dari 162 negara. Dibanding dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Philipina, dan Australia posisi Indonesia berada jauh di bawahnya (2001). Tentang daya saing atau *competitive index* (CI) begitu pula halnya. Berbagai lembaga internasional, misalnya *World Economic Forum* (WEF) dan *International Institut for Management Development* (IIMD) juga

mendudukan Indonesia pada posisi yang rendah. Bahkan IIMD menempatkan Indonesia di posisi ke-49 dari 49 negara pada tahun 2001 (Ki Supriyoko, 2002).

Yang perlu digarisbawahi adalah, masuknya PTA ke Indonesia tidak hanya membidik sektor ekonomi saja. Namun, lebih dari itu, pertarungan ideologi yang berkedok akulturasi budaya manca menjadi agenda tersembunyi (*hidden agenda*) arus neoliberalisme. Tak pelak lagi, pendidikan lalu dijadikan sebagai media untuk mensosialisasi agenda neoliberal. Siapkah pendidikan nasional kita menghadapi kompetisi dengan Perguruan Tinggi Asing (PTA) di negeri kita ini dengan segala efeknya?

### **Menggugat Komersialisasi Pendidikan**

Dua kekuatan besar—pasar dan negara—banyak diperdebatkan oleh para tokoh dunia yang turut mewarnai perkembangan ekonomi internasional, di samping keberadaan *civil society*. Dua kekuatan tersebut adalah kelompok teori ekonomi klasik dengan liberalisme pasar, seperti Adam Smith (1723-1790), David Ricardo (1772-1823), Herbert Spencer (1820-1903) (Steger, 2005:13) dan aliran Merkantilisme yang membatasi perdagangan dan industri dengan melakukan proteksi terhadap perekonomian negara (Fakih, 2002:46). Dengan kata lain, menurut aliran yang kedua, negara mempunyai otoritas penuh terhadap kebijakan pasar demi terciptanya kesejahteraan suatu bangsa (*welfare state*). Gagasan ini dipelopori oleh John Maynard Keynes (1883-1946) (Fakih, 2002:46). Perdebatan tersebut memunculkan benang merah apakah pasar yang 'menyetir' perekonomian suatu negara tanpa ada intervensi yang berarti dari negara bagi perekonomian suatu bangsa, atautkah negara mempunyai otoritas penuh terhadap pasar

sebagaimana diungkapkan oleh Charles Lindblom...*the operation of parlements and legislatives bodies, bureaucraties, parties, and interest groups depends in large part on the degree to which government replaces market or market replace government...* (Nugroho, 2001:130). Namun, globalisasi secara tidak langsung telah mempolarisasi peran negara.

Secara konstitusi Indonesia menganut sistem perekonomian sosialisme, yang mengutamakan kesejahteraan rakyatnya, atau sering disebut dengan ekonomi Pancasila. Dalam beberapa diskusi, perekonomian Indonesia juga disebut sebagai perekonomian substitusi, yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengintervensi sektor ekonomi dengan tetap memperhatikan kebebasan pasar (Mubyarto,1994:60). Namun, dalam prakteknya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengarah pada liberalisme ekonomi dengan pasar yang menjadi tolak ukur segala sesuatunya. Ini terbukti, dengan beberapa kasus yang menimpa bangsa Indonesia seperti kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di atas kemampuan rata-rata daya beli mayoritas rakyat yang mengakibatkan semakin melambungnya harga bahan makanan pokok (sembako), sehingga jumlah orang miskin naik secara drastis.

Tentu kebijakan ini sama sekali tidak memihak kepada nasib rakyat yang sangat membutuhkan uluran tangan dari pemerintah. Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan kepada rakyat sebesar Rp. 100.000/bulan, sebagai kompensasi kenaikan BBM tidak mampu menutupi kebutuhan rakyat akibat inflasi yang ditimbulkan oleh kenaikan BBM. Ironisnya, dana subsidi tersebut juga memicu konflik horizontal karena banyaknya manipulasi, baik pada

persoalan pendataan penduduk miskin di Indonesia yang dilakukan oleh BPPS, maupun adanya *kong kalikong* atau nepotisme pejabat desa dengan warga setempat.

Di sektor pendidikan, sejak diberlakukannya BHMN bagi empat perguruan tinggi negeri —UGM, ITB, IPB dan UI— kampus dituntut untuk 'menghidupi' diri sendiri. Akibatnya, biaya pendidikan melambung tinggi dan masyarakat kecilpun tidak bisa mengakses pendidikan tinggi (Kompas,1 Mei 2003). Pendidikan hanya dapat dinikmati golongan *the upper class* dan *the middle class*, sedangkan golongan *the lower class*, tidak dapat menikmati fasilitas pemerintah ini.

Persoalan tersebut tentu sangat bertentangan dengan salah satu butir tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 “mencerdaskan kehidupan bangsa“. Sedangkan di bidang kesehatan, biaya kesehatan pun merangkak naik, yang mengakibatkan minimnya pelayanan kesehatan, orang sakitpun bertebaran dimana-mana, seperti Demam Berdarah, Flu Burung, Busung Lapar, kurang gizi, Antrax, Diare, dan lain sebagainya. Persoalan tersebut di atas juga dipicu oleh utang luar negeri yang menyebabkan pemerintah seolah-olah menjadi 'kerdil' sehingga harus tunduk kepada aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh lembaga donor internasional seperti *Paris Club*, *London Club*, IMF, dan Bank Dunia yang merugikan negara Indonesia (Pancasisi,2002:81).

Sebagai bahan renungan untuk melakukan aksi, pemerintah seharusnya memperkuat posisi tawar (*bargaining position*). Keringanan utang dan bahkan pembebasan utang perlu diperjuangkan, tidak hanya memperjuangkan untuk

restrukturisasi utang saja (*debt restructuring*). Perasaan gengsi dikesampingkan terlebih dahulu. Negara kita merupakan salah satu negara yang tertimpa krisis paling parah, tetapi sikap para elite belum mencerminkan *sense of crisis* (Pancasisi,2002:81). Ini terbukti dengan maraknya pejabat tinggi negara seperti DPR, MPR, Presiden dan Wakil Presiden yang berlomba-lomba untuk menaikkan gajinya pasca kenaikan BBM pada 1 Oktober 2005 yang lalu, dengan alasan peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja. Padahal awal mula dinaikkannya BBM adalah demi mensejahterakan rakyat dan mengentaskan kemiskinan, bukan mensejahterakan elite, karena elite sudah sejahtera dibandingkan dengan rakyat kita. Persoalan tersebut, diperparah dengan pengadaan *teleconference* yang menelan biaya milyaran rupiah, apakah sikap ini yang disebut merakyat?

Sikap para elite tersebut tidak patut dilakukan, terutama para wakil rakyat, yang katanya penyalur aspirasi rakyat, tetapi justru malah sebaliknya mereka tega memakan uang rakyat, dan justru perilakunya sangat menindas rakyat. *Bargaining* seharusnya dilakukan dengan pihak asing, agar kebijakan-kebijakannya diorientasikan untuk memperbaiki kualitas pendidikan, bahkan pemerintah seharusnya menyediakan pendidikan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Alokasi dana untuk pendidikan sebesar 20% dari anggaran APBN hanya tertuang dalam undang-undang sistem pendidikan nasional, namun dalam realitas empiris masih jauh dari harapan. Ironisnya, implementasi yang belum mencapai 20% justru malah dikorupsi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Memang Indonesia sedang dilanda budaya korupsi, sebagaimana yang tercatat

dalam *Transparency International Corruption Perception Index(CPI) 2005*

berikut ini:

No	Negara	Peringkat Negara	Peringkat regional	Skor CPI 2005	Tingkat kepercayaan	Survey yang digunakan
1	Banglades	158	24	1.7	1.4-2.0	7
2	Myanmar	155	23	1.8	1.7-2.0	4
3	Pakistan	144	22	2.1	1.7-2.6	7
4	Indonesia	137	21	2.2	2.1-2.5	13
5	Papuanuigini	130	19	2.3	1.9-2.6	4
6	Kamboja	130	19	2.3	1.9-2.5	4
7	Filiphina	117	17	2.5	2.3-2.8	13
8	Nepal	117	17	2.5	1.9-3.0	4
9	Vietnam	107	16	2.6	2.3-2.8	10
10	India	88	15	2.9	2.7-3.1	14

Sumber: *Transparency International Corruption Perception Index (CPI)* (Kompas, 06 Desember 2005).

Melihat kondisi tersebut, bisa disimpulkan bahwa para elite di negeri ini telah "teracuni" oleh ideologi kapitalisme global, yang telah memberangus sikap kritis terhadap kebijakan Asing dan diperparah dengan katidakpedulian mereka terhadap nasib bangsa Indonesia. Belajar ke luar negeri (Barat) bukanlah hal yang buruk, karena diakui atau tidak, mereka lebih maju dibandingkan negara kita, tetapi sebagai catatan, penting untuk terus dikembangkan sikap kritis pada setiap individu untuk menghadapi arus global. Perlu diketahui bahwa pendidikan tidak hanya transfer pengetahuan tetapi juga nilai-nilai peradaban (*transfer of knowledge and value*). Oleh karena itu kita harus menghindari *brain washing* (cuci otak) oleh negara-negara Barat dengan bercokolnya perguruan tinggi Asing

di Indonesia. Inilah yang menjadi kekhawatiran kita, bahwa pendidikan akan dijadikan sebagai sarana sosialisasi agenda neoliberal.

### **Elitisme Pendidikan Tinggi**

Ketika perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, terseret arus besar neoliberal, yang menjelma dalam komodifikasi pendidikan, maka mereka juga tidak luput masuk ke dalam dilema industrial. Perguruan tinggi bisa menggali pendanaan lokal dengan menjual jasa pendidikan kepada masyarakat secara cepat dan menguntungkan, di sisi lain di dalam PT itu sendiri terjadi degradasi kualitas pendidikan. Atau mempertahankan kualitas pendidikan namun kesulitan dalam pengadaan pendanaan pendidikan. Supaya pendidikan tinggi bisa cepat dipasarkan, maka mereka harus merumuskan pendidikan yang cepat saji, cepat disantap oleh konsumen, cepat berproduksi lagi, cepat menciptakan kesejahteraan. Maka terjadilah apa yang dinamakan “Mcdonaldisasi pendidikan tinggi”(Nugroho,2002:14-15).

Menurut Heru Nugroho (2003:14-15), (kompas, 22 Juni 2003), ada empat ciri Mcdonalisasi yang sedang melanda pendidikan tinggi kita. *Pertama*, kuantifikasi, yakni ketika cara evaluasi hasil dan produk pendidikan tinggi hanya dilihat dari kuantitas saja. *Kedua*, efisiensi, yaitu program studi yang dinilai menghasilkan uang semakin didorong dan difasilitasi, sedang yang kurang menghasilkan terancam ditutup. *Ketiga*, prinsip keterprediksian, artinya kurikulum yang didesain harus mampu mengantisipasi kebutuhan pasar tenaga kerja tanpa melihat dimensi lainnya sehingga justru menciptakan pendidikan ala robot. Dan *kempat*, prinsip teknologisasi, yaitu penyelenggaraan pendidikan harus



selalu menggunakan teknologi modern atau bahkan *hi-tech*. Namun pada saat yang sama, lembaga pendidikan tidak mampu mengontrol penerapan teknologi dalam masyarakat.

Mcdonaldisasi pada sektor pendidikan tinggi ternyata telah menciptakan sangkar besinya sendiri, yaitu pertumbuhan, kuantifikasi, dan keharusan memproduksi sebanyak-banyaknya. Mcdonaldisasi pendidikan pada awalnya memang bermula dari sesuatu yang rasional, yaitu otonomi kampus, namun berakhir dengan irasionalitas, yaitu dehumanisasi, penurunan kualitas pendidikan tinggi dan komersialisasi pendidikan tinggi yang hanya berorientasi pada pengerukan keuntungan semata.

Akibat dari mcdonalisasi pendidikan tinggi tadi terjadilah perlombaan pengumpulan dana masyarakat oleh perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri demi untuk memenuhi biaya operasional pendidikan yang semakin tinggi. Hal tersebut dilakukan mulai dari membuka pendaftaran siswa SMU yang belum lulus sekolahnya sampai membuka jalur khusus bagi calon mahasiswa yang akan mendaftarkan diri di perguruan tinggi. Lewat jalur khusus ini peserta dibebaskan tes masuk perguruan tinggi negeri, namun mereka harus berani membayar uang masuk sebesar 15 juta sampai 150 juta. Siapa yang bermodal besar, dialah yang akan memenangkan kompetisi tersebut (Kompas, 22 Juni 2003).

Perguruan tinggi negeri yang dahulu selalu berpihak kepada rakyat kecil, dan memikirkan nasib rakyat kecil agar mereka dapat mengenyam pendidikan yang sama seperti orang-orang kaya, sekarang mulai berbalik arah. Keberpihakannya sekarang telah musnah digantikan dengan pengerukan

keuntungan yang diakibatkan oleh komersialisasi pendidikan tinggi (Nugroho, 2002:3-4). Ini merupakan salah satu imbas dari liberalisasi dalam dunia pendidikan. Segala urusan diserahkan kepada pasar dengan janji-janjinya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tetapi dalam realitas praktisnya janji tersebut hanyalah persoalan yang sangat utopis, terutama di negara-negara sedang berkembang.

Intervensi pemerintah dalam dunia pendidikan pun semakin dipersempit ruang geraknya, yang berlaku adalah hukum pasar, siapa yang kuat dialah yang akan memenangkan kompetisi. Perlindungan terhadap orang miskin hanyalah sebuah gagasan yang tidak menyentuh realitas empirik. Akibatnya, orang miskin akan tetap pada garis kemiskinannya dan tidak bisa menaikkan status sosialnya menjadi lebih tinggi.

Pergeseran nilai pendidikan yang semula bersifat egaliter dan tidak mengenal status sosial tertentu, secara tidak langsung telah berubah wajah menjadi elitis. Pendidikan sekarang hanya mampu diakses oleh kaum *the upper class*, sehingga mereka yang tergolong *the lower class* akan tetap pada jalur kemiskinan dan hidup serba kekurangan. Kalau dianalisis secara mendalam pendidikan kita telah kembali pada masa penjajahan kolonial Belanda, yang hanya diperuntukkan bagi kaum ningrat (*the upper class*) atau mereka yang mempunyai status sosial yang tinggi di mata penjajah. Sedangkan rakyat pribumi tidak mempunyai hak untuk mengakses pendidikan yang mengakibatkan mereka terus *taken for granted* terhadap situasi dan kondisi yang diciptakan oleh penjajah.

Kondisi tersebut sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pola pendidikan yang digagas oleh Van de Venter sebagai wujud dari pemberlakuan politik etis di Indonesia yang dilaksanakan secara otoriter dan anarkis. Namun di era kemerdekaan, gagasan Van de Venter tersebut telah 'berubah wajah' menjadi elitisme pendidikan yang disebabkan oleh melambungannya biaya pendidikan dan himpitan globalisasi yang terus menganga dalam sekat-sekat kehidupan. Yang perlu digarisbawahi yaitu walaupun latar belakang yang menyebabkan keterpurukan dunia pendidikan itu berbeda, namun eksekusi yang ditimbulkan tidak jauh berbeda, pendidikan masih berpihak pada kaum yang berkantong tebal dan hanya sekelompok orang saja yang menikmatinya.

### **Ideologi Neoliberalisme Menjelma dalam Pendidikan**

Globalisasi ekonomi yang mengandalkan pada fundamentalisme pasar, kebebasan individu, standar hidup global, privatisasi dan lain-lain, telah menjadi isu publik (*common issues*). Di sisi lain, globalisasi ekonomi juga 'menjanjikan' mempercepat proses sosial untuk menciptakan kesejahteraan sosial di negara-negara sedang berkembang. Seperti yang diungkapkan oleh Joseph E. Stiglitz (2002:4)

*.....because of globalization many people in the world now live longer than before and their standart living is far better. People in the West my regard low-paying jobs at Nike as exploitation, but a far better option than staying dwon on the farm and growing rice. Globalization has reduced the sense of isolation felt in much of the developing world and has given many people in the developing countries access to knowledge well beyond the reach of even the wealthiest in any country a country ago...*

Namun, kita tidak bisa mengenyampingkan dampak negatif yang ditimbulkan akibat globalisasi ekonomi, karena prioritasnya adalah untuk

menekan biaya produksi serendah mungkin dari pada untuk melestarikan keseimbangan ekologis, yang kerusakannya tidak akan menjadi beban bagi perusahaan secara finansial (Gorz,2005:5). Akibatnya, keadaan tersebut semakin memperdalam jurang perbedaan antara kaum yang bermodal dengan yang tidak bermodal, dan antara yang kaya dengan yang miskin. Sarbini Sumawinata (2004:23) mengatakan, pada sektor ekonomi global akan berlaku hukum evolusi Darwin *survival of the fittest*, siapa yang mampu mempertahankan eksistensi dirinya dalam persaingan global dia akan memenangkan “pertandingan” dalam kompetisi tersebut.

Persoalan tersebut merupakan eksese dari persaingan pasar bebas. Celakanya, globalisasi tidak hanya berhenti pada sektor ekonomi saja, tetapi juga budaya/tradisi, pendidikan, geografi, politik, bahkan menjalar sampai pada basis ideologi suatu bangsa. Kekuatan ideologis ini akan merombak tatanan akar tradisi-budaya bangsa (Steger,2005:201-202).

Kehadiran Perguruan Tinggi Asing (PTA) di Indonesia yang tidak bisa dibendung lagi sejak pemerintah meratifikasi *World Trade Organization* (WTO) melalui UU No. 7 tahun 1994 merupakan salah satu contohnya. Kita adalah anggota WTO yang berkewajiban mentaati segala aturan main yang ada di dalamnya. Karena melalui *General Agreement on Trade in Services* (GATS) WTO memposisikan pendidikan sebagai jasa yang dapat saling diperdagangkan, —dan di dalamnya termasuk perguruan tinggi— maka ”perdagangan” jasa pendidikan tinggi akan semakin sulit dielakkan. Implikasinya, kehadiran PTA di

negara kita tidak bisa dibendung lagi (Ki Supriyoko, kompas, 11 September 2003).

Akibat tekanan tersebut, meskipun dalam keadaan yang belum mempunyai persiapan yang matang untuk menyambut PTA, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) mengeluarkan keputusan Nomor 223 /U/1998 tentang: kerjasama antarperguruan tinggi. Dalam aturan tersebut, terdapat empat butir kerjasama yang akan dilaksanakan antar perguruan tinggi: [1]. perguruan tinggi lain di dalam negeri; [2]. lembaga lain di dalam negeri; [3]. perguruan tinggi di luar negeri; [4]. lembaga lain di luar negeri (<http://www.dikti.org>). Dalam UU SISDIKNAS, pasal 64, disebutkan bahwa “satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi peserta didik warga negara asing, dapat digunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan Pemerintah Republik Indonesia (Darmaningtyas, 2004: 266).

Berdasarkan keputusan di atas, kran “perdagangan“ pendidikan telah dibuka oleh pemerintah, walau kita sebenarnya masih tertatih-tatih dengan adanya SK Mendiknas tersebut. Dalam tataran idealitas, seharusnya Indonesia harus mempersiapkan diri terlebih dahulu dalam menghadapi perdagangan di bidang jasa pendidikan, meskipun persoalan ini dimaknai untuk memacu pemerintah Indonesia agar lebih serius dalam menangani dunia pendidikan yang sangat membutuhkan terapi kejut untuk meningkatkan kualitasnya. Namun, kita juga tidak bisa terus menerus menaruh aprioria dengan kebijakan tersebut.

Dengan dibukanya kran perdagangan pendidikan bagi lembaga pendidikan asing di atas, Indonesia akan membuka mata lebar-lebar, serta melakukan usaha yang serius untuk melakukan *improvisasi* (meningkatkan kualitas) pendidikan Indonesia, dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam menghadapi percaturan global. Karena pendidikan merupakan salah satu sarana yang paling strategis untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam suatu negara tertentu.

Di samping itu, kita juga perlu mewaspadaikan eksese negatif dari industrialisasi sebagaimana dikatakan oleh Weber (2003:13), termasuk dalam hal ini adalah industrialisasi pendidikan yaitu dijadikannya pendidikan sebagai komoditas industri. Industrialisasi yang menerapkan prinsip-prinsip rasionalisasi telah menghasilkan *disenchantment of the world*, yaitu suatu proses memudarnya pesona dunia karena segala hal yang ada di bumi ini dapat dikalkulasi secara rasional. Akibatnya, terjadilah penurunan kualitas kehidupan manusia atau *dehumanisasi* karena segala hal yang sebelumnya bersifat subyektif dapat di ubah menjadi obyektif, yang kualitatif menjadi kuantitatif.

Searus dengan persoalan di atas, Peter Berger (1990:45) mengatakan kehadiran teknologi modern akan semakin mempercepat perubahan realitas kehidupan masyarakat, menjadi masyarakat industri, atau sering disebut dengan revolusi industri. Dengan demikian, kehadiran PTA di Indonesia akan membuka lebar jalannya revolusi kapitalis, terutama di negara-negara dunia ketiga karena pendidikan merupakan proses transformasi pengetahuan dan nilai-nilai budaya. Tidak ada pengetahuan bebas nilai yang tidak melakukan pemihakan terhadap

sesuatu. Terlepas dari pro-kontra, kehadiran PTA merupakan pilihan yang dilematis bagi bangsa Indonesia. Di satu sisi, Indonesia memang belum siap untuk berkompetisi di sektor pendidikan karena prestasi pendidikan Indonesia masih sangat mengesankan, sedangkan di sisi lain, kehadiran PTA tidak bisa dibendung lagi (Ki Supriyoko, Kompas, 11 September 2003).

Lebih jauh lagi hal itu juga akan semakin mempercepat transformasi ideologi Barat, akhirnya terjadilah apa yang disebut dengan deideologisasi. Akselerasi transformasi ideologi tersebut akan melunturkan nilai-nilai tradisi bangsa, salah satu kasus yang sekarang telah melanda bangsa Indonesia di kalangan ABG kita adalah merebaknya pergaulan bebas yang mengakibatkan semakin banyaknya pengidap penyakit AIDS, pornografi sudah menjadi hal biasa, budaya pop (*pop culture*) yang menghinggapi remaja, pola pikir pragmatisme yang meracuni pelajar, budaya konsumtif masyarakat semakin meningkat dan lain sebagainya. Singkatnya, kaum remaja dan masyarakat kita telah "diracuni" oleh ideologi global. Penulis bukannya menolak tradisi ke-Barat-an (*westernization*), tetapi sebisa mungkin kita membangun sikap kritis terhadap dunia yang semakin mengglobal, agar tidak terbawa arus di dalam gelombang besar tersebut. Sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa negara-negara yang tergabung dalam kelompok GATS didominasi oleh negara-negara Barat yang materialistik dan positivistik.

Tidak semua hal yang dibawa globalisasi itu membawa dampak yang buruk, begitu pula dengan PTA yang ada di Indonesia, namun apabila tidak tertanam budaya kritis terhadap bangsa ini, maka Indonesia akan memasuki era

kolonialisasi baru yang lebih dasyat lagi berupa penjajahan budaya. Dampak yang ditimbulkan tidak langsung dirasakan secara individu, karena penjajahan tidak lagi dilakukan secara fisik, namun dilakukan melalui strategi kebudayaan. Tak pelak lagi, akibat yang ditimbulkan akan semakin parah terutama bagi negara-negara dunia ketiga, karena percepatan tersebut ditunjang dengan kecanggihan teknologi, media massa, dan isu-isu global.

Menghadapi kenyataan di atas, kita seharusnya memahami mesin-mesin globalisasi yang semakin kompleks, karena terus mengalami perubahan dari masa ke masa, agar tidak terperosok dalam jebakan globalisasi. *Brain washing* (cuci otak) yang menjadi agenda tersembunyi (*hidden agenda*) masuknya PTA di Indonesia harus kita sikapi secara arif dan bijaksana. Oleh karena itu, kita harus menyatukan niat dan membulatkan tekak untuk menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang berkarakter dan mempunyai peradaban yang tinggi, serta terus melestarikan tradisi ketimuran yang telah dibangun oleh nenek moyang bangsa. Globalisasi tidak untuk ditolak secara mentah-mentah, tetapi untuk disikapi secara kritis dan bijaksana sehingga bisa dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Inilah strategi negara-negara dunia ketiga untuk melakukan *counter* terhadap arus global.

## **Penutup**

Penulis berharap dengan adanya PTA di Indonesia akan mampu mendorong pemerintah dan semua elemen yang terkait untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia karena untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) harus ditunjang dengan SDM yang berkualitas. Selain itu,



rakyat Indonesia juga harus melakukan filterisasi terhadap derasnya arus budaya manca karena globalisasi telah merambah pada sektor kolonialisasi budaya. Upaya protektif bagi seluruh elemen masyarakat hendaknya dijadikan sebagai strategi alternatif untuk membendung budaya tersebut. Di samping itu, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, maka sebagai kekuatan penyeimbang (*balancing power*), rakyat harus mampu menjadi *locus of control* bagi pemerintahan karena elite birokrat kita sedang dilanda budaya korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) sampai pada taraf kronis.

Pada ranah pendidikan, seluruh *stake holder* pendidikan harus mempersiapkan sedini mungkin untuk menyambut kedatangan Perguruan Tinggi Asing (PTA) dengan mengedepankan kualitas—management yang baik, guru yang bermutu, media pendidikan yang memadai, kurikulum yang kontekstual, dan sarana penunjang lainnya. Kehadiran PTA di Indonesia memang pilihan yang dilematis, karena pemerintah tidak bisa menolak kehadiran PTA tersebut. Di dalam WTO, pendidikan merupakan bagian dari komoditi di bidang jasa yang diperdagangkan dalam perjanjian pasar bebas dan pihak Asing juga mulai melirik sektor ini, karena dinilai merupakan lahan yang belum banyak dijajah oleh negara-negara terbelakang. Di balik itu semua, pendidikan dijadikan sebagai agen untuk mensosialisasikan ideologi neoliberal dengan fundamentalisme pasarnya. Di sisi lain, PTA juga dijadikan sebagai wahana yang paling strategis untuk deideologisasi.

Berdasarkan pemaparan di atas, langkah antisipatif yang harus dilakukan oleh kita semua adalah membangun sikap kritis pada semua elemen—masyarakat,

pemerintah, pelajar, mahasiswa, wiraswasta, buruh, dan lain-lain—untuk mensikapi kehadiran PTA yang akan menanamkan ideologi neoliberal. Wacana-wacana post-kolonial menjadi penting adanya untuk membaca realitas yang tidak tampak karena diakui atau tidak, penjajahan di negara-negara dunia ketiga tidak berada pada penjajahan fisik lagi, namun penjajahan budaya yang tidak semua orang merasakannya. Inilah yang dinamakan neo-imperialisme, dengan menggunakan *information technology* (IT).

## Daftar Pustaka

- Berger, Peter. 1990, *Revolusi Kapitalis*. Jakarta: LP3ES,.
- Darmaningtyas, dkk.2004. *Membongkar Ideologi Pendidikan; Jelajah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Gorz, Andre. *Anarki Kapitalisme*.2005. Yogyakarta: Resist Book.
- Lindblom, Charles E.1977. *Politics and Markets; the Worl's Political Economic Systems*. New York: Basic Book, Inc., Publishers.
- Mubyarto.1994. *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Nugroho, Heru.2002. *Mcdonalisasi Pendidikan Tinggi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Rahardjo, Dawam,1987. *Kapitalisme Dulu dan Sekarang*. Jakarta: LP3ES.
- Schroeder, Ralph.2002. *Max Weber Tentang Hegemoni Sistem Kepercayaan*. Diterjemahkan oleh Ratna Noviani. Yogyakarta: Kanisius.
- Steger, Manfred B.2005. *Globalisme: Bangkitnya Ideologi Pasar*. Yogyakarta: Lafadl Pustaka.
- Stiglitz, Joseph E.2002. *Globalization and Its Discontents*. London: Penguin Books.
- Sumawinata, Sarbini,2004. *Politik Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Supriyoko, Ki. "Siap-Siap Menyambut Kehadiran Perguruan Tinggi Asing" dalam *Harian Kompas*, 11 September 2003.
- , "Nilai Keberagaman Sebagai Titik Pangkal Upaya Pengembangan Pendidikan Nasional Indonesia di Masa Depan" (makalah disampaikan dalam panel forum dengan tema '*Menggagas Paradigma Pendidikan Nasional Dalam Era Multikultur*' yang diselenggarakan oleh Presma fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 18 Mei 2002,
- Wibowo, I dan Wahono, Francis,2003. *Liberalisme*. Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas.

### Non buku:

Koran harian *KOMPAS Yogyakarta*, 06 Desember 2005

Koran harian *KOMPAS Nasional*, Kamis 1 Mei 2003

Koran harian *KOMPAS Nasional*, 22 Juni 2003